

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Anwar.2011. *Komunikasi Politik*.Graha Ilmu.Yogyakarta
- _____.2014.*Politik Pencitraan Pencitraan Politik*.Graha Ilmu.Jakarta
- Djatmika, Prija. 2004. *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*.Jakarta : Bayu media Publishing
- Hill, David.2011. *Pers di Masa Orde Baru*.Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jakarta
- Manan, B.2016.*Pers,Hukum,dan Hak Asasi Manusia*.Dewan Pers.Jakarta.
- Mulya, L.T.2005.*Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*.Gramedia Pustaka
Utama.Jakarta
- Panuju, Redi. 2002. *Relasi Kuasa Negara Media Massa Dan Publik (Pertarungan Memenangkan Opini Publik Dan Peran Dalam Transformasi Social.)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Siregar, Ashadi. 2008. *Etika Komunikasi*. Pustaka Book Publisher. Yogyakarta.
- Surakman. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
- Susanto, E, dkk.2017.*Hukum Pers di Indonesia*.Pt.Rineka Cipta.Jakarta
- Syah, Syirikit.2014.*Membincang Pers, Kepala Negara,dan Etika Media*.
PT.Elex Media Komputindo.Jakarta.

Sumber jurnal:

Daulay.Hamdan.2008.*Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam*.Jurnal Penelitian Agama vol.XVII.no 2.

Dewan Pers.2011.*Profesionalisme,Sejarah,dan Masa Depan Pers Daerah*.Dewan Pers.

_____. 2014.*Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers*.Dewan Pers.Jakarta.

_____.2015.*Kesehatan Perusahaan Pers*.Dewan Pers.Jakarta

_____.2016.*Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development*.Dewan Pers.Jakarta.

Djaelani.2013.*Tekhnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*.vol XX no 1

Hutagalung Inge.2013.*Dinamika Sistem Pers di Indonesia*.Jurnal interaksi vol II nomor 2.

Lesmana.Tjipta.2005.*Kebebasan Pers dilihat Dari Perspektif Konflik,antara Kebebasan dan Tertib Sosial*.Jurnal Ilmu Komunikasi vol.2.no 1

Lestari.Endah.2011.*Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Hukum bagi Wartawan berdasarkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers*.Fakultas Hukum vol.XX.no.20.Surabaya.

Perdana Herlambang.2010. *Implementasi Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam mendorong Demokratisasi Otonomi Daerah.*

Poti, Jamnur. 2011. *Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan.*
Jurnal ilmu politik dan ilmu pemerintahan.Vol 1.nomor 1.

Saptohadi.Satrio.2011.*Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia.*Jurnal
Dinamika Hukum vol 11.no 1.

Sartini.2008.*Etika Kebebasan Beragama.*Jurnal Filsafat vol.18 nomor
3.Yogyakarta.

Siregar Efendi.2008.*Jurnal Sosial Demokasi.*Pergerakan Indonesia.Jakarta.

Suprayogi.*Kebebasan Pers Menurut UU no 40 tahun 1999.*Uin
Kalijaga.Yogyakarta

Triwardani.Reny.2010.*Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik
Media.*Jurnal Ilmu Komunikasi vol.7.no 2.Yogyakarta

Wawancara Dengan Ketua Pwi Sumut

1. Menurut bapak apakah penerapan kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang sudah berjalan dengan semestinya?

Jawab sudah baik penerapannya hanya saja ada sedikit kekurangan pengetahuan oknum atau masyarakat tentang fungsi pers atau wartawan.

2. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?

Jawab :PWI melakukan sosialisasi ke instansi pemerintahan maupun kepada masyarakat,seperti pwi lakukan di polri,tni,dan pemerintahan kabupaten kota. Dan disini juga wartawan harus paham tugas dan kewajibannya, tidak semua informasi dari narasumber harus diminta,contoh polisi ingin menaangkap gerbong narkoba,ini tidak bisa diberikan informasi kepada pers dikarenakan akan mengganggu kinerja polri,begitu juga di kalangan tni pers tidak boleh menggali informasi yang dianggap penting oleh tni,harus mempunyai prosedurnya dikarenakan itu rahasia Negara.ini yang perlu dipelajari oleh wartawan.

3. Menurut bapak apakah Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 sangat membantu PWI dalam menjalankan tugas?

Jawab sangat membantu sekali hanya saja uu no 40 tahun 1999 perlu direvisi masalah pembuatan perusahaan pers yang dimana pers mencari sendiri uang untuk kebutuhannya,tetapi untuk kebebasannya pers sangat terbantu dengan adanya uu ini. Dan pwi untuk saat ini tidak berani mengajukan revisi kepada pemerintah dikarenakan takut yang akan direvisi itu kebebasannya bukan perusahaan persnya.

4. Menurut Bapak daerah manakah yang sering terjadi pelanggaran pers di Sumatera Utara?

Jawab. Di daerah pematang siantar masih sering terjadi konflik wartawan dengan instansi maupun masyarakat hanya saja tidak sampai ke pengadilan dikarenakan penyelesaiannya proses damai

5. Untuk mendukung kebebasan pers dibutuhkan wartawan yg professional juga bagaimana upaya PWI mengatasi hal tersebut?

Jawab : untuk saat ini pwi sedang melakukan uji kompetensi wartawan, disini wartawan diberi pelajaran dan pengetahuan bagaimana cara-cara meliput yang benar dan sesuai prosedur. Dan untuk wartawan di sumut yang berjumlah hampir 750 wartawan baru setengah dari mereka yang sudah melakukan uji kompetensi wartawan ini, sedangkan setengah lagi masih proses dikarenakan jumlah personel yang melakukan pengujian terbatas dan harus memanggil dari luar..